



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

DEWAN PERS RENCANA TINGKATKAN
PROFESIONALISME WARTAWAN

PRESIDEN TINJAU PELAKSANAAN
VAKSINASI WARTAWAN

PRESIDEN: PERS JAGA OPTIMISME BANGSA



PRESIDEN: PERS JAGA OPTIMISME BANGSA



PRESIDEN MENYAMPAIKAN PESAN DALAM HARI PERS NASIONAL 9 FEBRUARI DI ISTANA NEGARA. (FOTO: MUCHLIS JR-BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN)

Presiden Joko Widodo menyatakan di saat pandemi sekarang ini pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjaga optimisme serta menjaga harapan bangsa Indonesia.

Presiden menyampaikan pesan ini dalam Hari Pers Nasional 9 Februari di Istana Negara. Acara di Istana Negara dihadiri antara lain Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari dan perwakilan konstituen pers. Sedangkan di Candi Bentar Hall Ancol Jakarta hadir sejumlah undangan seperti anggota Dewan Pers, insan pers, para peraih anugerah dalam peringatan HPN 2021 serta hadirin secara virtual sejumlah provinsi di Indonesia.

Presiden menambahkan bahwa seluruh Insan pers telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. "Saya menyadari Insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi covid-19 sekarang ini kita semua tahu permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara termasuk negara kita Indonesia," tutur Presiden.

Selanjutnya Presiden menjelaskan, "Saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga



HARI PERS NASIONAL 9 FEBRUARI DI ISTANA NEGARA PRESIDEN JOKO WIDODO BERSAMA KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH DAN KETUA UMUM PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA ATAL SEMBIRING DEPARI PERWAKILAN KONSTITUEN PERS. (FOTO: MUCHLIS JR-BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN)

masalah perusahaannya masalah, perusahaannya, keuangannya yang juga tidak mudah seperti tadi di sampaikan oleh ketua PWI." Kemudian ditambahkan, pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media, PPH 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021.

"Juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPH badan, kemudian pembebasan PPH dua impor dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain ini juga diberikan kepada industri media termasuk pembebasan abodemen listrik, keringanan dan bantuan yang diberikan pada industri media dan awak media," kata Presiden seraya menambahkan upaya itu tidak seberapa namun perlu dipertimbangkan juga bahwa beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat.

"Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan," ujar Presiden.

Dalam kesempatan HPN 2021 ini juga Presiden menyampaikan kabar baik bahwa akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah di siapkan kira-kira 5000 orang untuk bisa divaksin. "Ini termasuk pertama nanti keluar dari Biofarma 12 juta kita berikan 5000 untuk awak media," tegas Presiden. Vaksinasi awak media ini seiring dengan fokus

untuk melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

Presiden juga menyampaikan keprihatinan karena industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. "Saya setuju diperlukan konvergensi dan *level playing field* yang adil. Sebagian aspirasi ini telah ditampung dalam undang-undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pos Telekomunikasi dan penyiaran Namun demikian pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media."

"Saya akan perintahkan kepada Menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi *publisher right* agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan *over the top* yaitu layanan melalui internet," kata Presiden Joko Widodo.

"Perlu saya sampaikan juga bahwa undang-undang Cipta Kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. Saya juga telah memperoleh laporan bahwa tahun terbit peraturan menteri yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup *private* (swasta), aturan yang mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan *platform digital*. (Redaksi **Bulletin ETIKA**)

DEWAN PERS RENCANA TINGKATKAN PROFESIONALISME WARTAWAN

Dewan Pers pada tahun 2021 akan melakukan peningkatan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan fasilitas uji kompetensi. Untuk kegiatan yang diadakan di 34 provinsi ini ditargetkan 1700 wartawan akan disertifikasi. Selain fasilitas uji kompetensi Dewan Pers juga akan melakukan pendataan terhadap 350 perusahaan pers.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun yang mewakili Ketua Dewan Pers Mohammad NUH di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 1 DPR di Jakarta, hari Senin 1 Februari 2021. Hadir mewakili Dewan Pers langsung di DPR adalah Agus Sudibyo, Ahmad Djauhar, Agung Dharmajaya dan Hassanein Rais. Sedangkan Asep Setiawan hadir secara virtual. Rapat Dengar Pendapat ini dipimpin Wakil

Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Al-masyhari.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun memberikan pemaparan program Dewan Pers di Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR

Dijelaskan bahwa fasilitas uji kompetensi bagi wartawan tahun 2021 merupakan kelanjutan dari program 2020 yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya Pandemi Covid-19. Tahun 2020 yang lalu dijadwalkan pelatihan dan fasilitas uji kompetensi di 20 provinsi dengan target 480 peserta namun hanya dapat dilakukan di satu provinsi dengan peserta 24 wartawan.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun memaparkan pula bahwa pelaksanaan verifikasi faktual yaitu mendatangi lokasi perusahaan pers di berbagai provinsi di Indonesia yang semula tahun 2020 direncanakan 250 diubah menjadi 114. Namun realisasinya ternyata melebihi target yaitu 145 perusahaan yang telah dilakukan verifikasi faktual.

RENCANA ANGGARAN

Hendry Ch Bangun menyatakan bahwa anggaran Dewan Pers tahun 2021 adalah 35.614.034.000 dialokasikan untuk menunjang program komunikasi publik yang merupakan



WAKIL KETUA DEWAN PERS HENDRY CH. BANGUN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI 1 DPR DI JAKARTA, HARI SENIN 1 FEBRUARI 2021. (FOTO: DARI ZOOM DARI SIDANG KOMISI 1 DPR)

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2020

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
Terverifikasi Administratif dan Faktual	42	0	3	100	145
Terverifikasi Administratif	57	3	3	201	264
Belum Terverifikasi	573	76	157	3154	3960
Media Mendata	672	79	163	3455	4369

Tugas dan Fungsi Dewan Pers serta program dukungan manajemen untuk unsur kesekretariatan pelayanan kantor yang terdiri atas :

- Layanan pengembangan pers dan kerjasama Pers sebanyak Rp 5.319.842.000
- Layanan pengaduan masyarakat sebesar Rp 2.204.924.000
- Indeks Kemerdekaan Pers yakni survei di 34 provinsi sebesar 5.022.871.000
- Peningkatan kompetensi wartawan ini merupakan perbaikan atas target yang gagal dilakukan tahun lalu yaitu di 34 provinsi dengan target 1700 wartawan bersertifikat dengan anggaran Rp 10.072.174.000
- Kemudian pendaftaran dan verifikasi perusahaan pers dengan target verifikasi faktual untuk 350 perusahaan pers dengan anggaran Rp. 1.003.364.000
- Sementara untuk program dukungan manajemen layanan kesekretariatan dan perkantoran mencapai Rp 11.456.859.000
- Serta layanan sarana dan prasarana sebesar Rp 534.000.000.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Survei Indeks Kemerdekaan Pers yang tahun mencapai skor diatas 75, 27 yang artinya pers nasional dalam kondisi cukup bebas. Tahun ini diharapkan skor IKP naik menjadi 75, 50. Sedangkan program lain yang juga penting adalah melayani pengaduan masyarakat yang diharapkan dapat menyelesaikan 85 persen kasus selama setahun. Sebagai informasi sekitar 500 pengaduan masuk ke Dewan Pers sehingga hampir setiap minggu terdapat sidang penyelesaian pengaduan etik dengan panduan Kode Etik Jurnalistik.

PERLINDUNGAN PERS

Dewan Pers juga peduli dalam upaya perlindungan tugas pers dan dalam meningkatkan kualitas perusahaan pers melalui revisi peraturan dan program perusahaan pers. Kemudian Dewan Pers juga peduli terhadap pengaruh disrupsi dan teknologi informasi media sosial layanan platform berbasis internet terhadap pers dan pengaruh pandemic kepada wartawan dan industri pers.

Hendry Ch Bangun menjelaskan

mengenai revisi ini dimaksudkan sebagai upaya agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian maka nanti akan dapat hidup begitu pula dengan wartawannya tetap mendapatkan kesejahteraan yang cukup.

Dalam rangka perlindungan pers ini, Wakil Ketua Dewan Pers menjelaskan bahwa hingga saat ini sedang diupayakan dan dikoordinasikan dengan pemerintah adalah pertama mengenai penghapusan pajak impor kertas untuk media cetak, penghapusan pajak untuk produk media cetak, kemudian pemerintah menanggung biaya listrik dan perusahaan pers, kemudian pemerintah menanggihkan kewajiban pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untuk perusahaan pers selama satu tahun. Dalam kesempatan ini, Dewan Pers berharap DPR dapat mendukung perlindungan terhadap eksistensi pers karena dampak pandemi Covid-19 ini.

Dalam Raker Komisi 1 DPR ini lembaga lain yang hadir dan memaparkan kinerja dan program 2021 adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP). ●

PRESIDEN TINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI WARTAWAN

Presiden Joko Widodo tinjauan langsung hari pertama vaksinasi Covid-19 para wartawan yang dilaksanakan pada hari Kamis (25/2) di Hall Basket A, Gelora Bung Karno Senayan. Dalam tiga hari sekitar 5000 wartawan diundang untuk menerima vaksinasi pertama jenis Sinovac yang akan

dilanjutkan vaksinasi kedua sekitar dua minggu kemudian.

Presiden yang didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, mengharapkan vaksinasi yang sedang dilaksanakan ini dapat memberikan perlindungan kepada awak media terutama yang

berada di lapangan yang sering berinteraksi dengan publik. Presiden juga mengharapkan vaksinasi ini akan berjalan di provinsi-provinsi lain sehingga seluruh insan pers di Indonesia akan mendapatkan vaksinasi ini.

Menkominfo juga menjelaskan bahwa vaksinasi ini akan lanjutkan untuk awak media di daerah yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan Dewan Pers karena mereka bekerja di garis depan.

Sedangkan Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dikuti media mengatakan, vaksinasi untuk awak media merupakan bentuk perlindungan terhadap jurnalis. "Ini upaya meningkatkan kemerdekaan pers. Faktor yang meningkatkan kemerdekaan pers adalah pertama, meningkatkan kompetensi jurnalis. Kedua, memberikan perlindungan jurnalis. Ketiga, memberikan kesejahteraan jurnalis. Nah (vaksinasi) ini yang kedua," jelas Ketua Dewan Pers.

Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Agus Sudibyo menjelaskan setelah berlangsungnya vaksinasi ini pada hari pertama 25 Februari yang registrasi 1566 sedangkan yang divaksinasi tercatat 1506.



PRESIDEN JOKO WIDODO DI DAMPINGI MENTERI KOMINFO JOHNNY G. PLATE DAN KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH TINJAUAN HARI PERTAMA VAKSINASI COVID-19.
(FOTO: RUSMAN- BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN)



PRESIDEN JOKO WIDODO DI DAMPINGI MENTERI KOMINFO JOHNNY G. PLATE (KANAN) DAN KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH (KIRI). (FOTO: RUSMAN- BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN)

Sedangkan hari kedua 26 Februari yang registrasi 1870 yang divaksinasi 1824. Selanjutnya hari ketiga tercatat yang registrasi 1921 sedangkan yang divaksinasi 1897. Dengan demikian awak media yang registrasi seluruhnya 5357 sedangkan yang divaksinasi sebanyak 5227.

Dalam kesempatan terpisah, Agus Sudibyo menjelaskan bahwa vaksinasi ini merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada Hari Pers Nasional 2021. "Hal ini merupakan tindak lanjut dari pidato Presiden Jokowi yang menjanjikan sebanyak 17.000 wartawan akan mengikuti program vaksinasi tahap kedua pada peringatan HPN kemarin," katanya.

Agus menjelaskan bahwa program vaksinasi dalam tiga hari ini mengkomodir wartawan yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri melalui 11 asosiasi jurnalis dan perusahaan media seperti AJI, AMSI, ATVSI, ATVLI, Forum Pemred, LJTI, PFI, PRSSNI, PWI, SMSI dan SPS, "Sehubungan dengan keterbatasan kuota dan pentingnya penerapan protokol kesehatan di lokasi, vaksinasi kali ini tidak dapat melayani pendaftaran peserta pada hari pelaksanaan kegiatan," jelasnya.

"Selanjutnya agenda yang sama juga akan dilakukan di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara dengan melibatkan

Pemprov di daerah masing-masing," ujar Agus.

Terkait peran wartawan di dalam upaya penanganan pandemi dalam hal ini program vaksinasi, Agus mengatakan bahwa wartawan dan media massa bertanggungjawab untuk membangun pemahaman di masyarakat soal manfaat vaksin bagi individu maupun kelompok.

"Vaksinasi pada level individu mencegah seseorang untuk merasakan gejala COVID-19 yang berat. Sementara pada skala yang lebih besar, vaksinasi dapat mencegah kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia dan pemilik penyakit bawaan dari penularan. Kalau kita peduli pada



DEWANPERS

Berita Dewan Pers ETIKA: Terbit Bulanan, ● Pengurus Dewan Pers 2019 - 2022, ● Ketua: Mohammad NUH, ● Wakil Ketua: Hendry Chaerudin Bangun, ● Anggota: Ahmad Djauhar, Arif Zulkifli, Asep Setiawan, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Jamalul Insan, Muhamad Agung Dharmajaya, ● Kepala Sekretariat: Syaefudin, ● Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Mohammad NUH, ● Wakil Pemimpin Redaksi: Asep Setiawan, ● Tim Redaksi: Herutjahjo Soewardjo, Shanti Ruwyastuti, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Fadli, Iwahan Sudarwanto BR,

Alamat Redaksi: Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.

Tel: (021) 3521488, 3504877, 3504874-75, Faks: (021) 3452030; Email: sekretariat@dewanpers.or.id,

Twitter: @dewanpers Instagram: @officialdewanpers Facebook: Dewan Pers YouTube: Dewan Pers

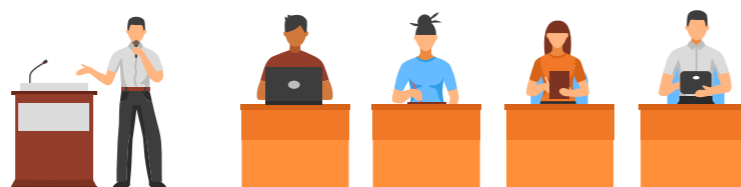
Web: dewanpers.or.id, (ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



▲ PARA WARTAWAN MENUNGGU GILIRAN VAKSINASI COVID-19 YANG DILAKSANAKAN DI HALL BASKET A, GELORA BUNG KARNO SENAYAN. (FOTO: BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN)

keselamatan diri dan orang-orang di sekitar, dan ingin agar kita dapat segera beraktivitas seperti sebelumnya, vaksinasi ini harus dilakukan,” ujar Agus.

Merespon masih adanya penolakan di dalam masyarakat terhadap vaksin, Agus mengimbau agar pelaku industri pers ke depannya dapat bersikap lebih rasional dan kritis di dalam melakukan tugas pemberitaan, “Kritis dalam artian, pertama, kalau memberitakan manfaat vaksin, jangan lupa beritakan efek sampingnya. Begitupun sebaliknya. Kedua, memahami kalau yang bicara tentang vaksin mestinya yang memiliki otoritatif.” Selanjutnya ditekankan bahwa “Jika narasumber tidak ada kredibilitas di bidang vaksin dan epidemiologi, jangan diberi panggung untuk mengomentari vaksin.” • (Redaksi *Bulletin Etika*)



REKAP: DATA PELAKSANAAN UKW 2019 DAN 2020

PENYELENGGARAAN UKW TAHUN 2019

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	67	1066	101	35	1202		1202
2	AJI	6	65	19	26	110		110
3	IJTI	9	129	1	0	130	5	135
4	LPDS	9	148	15	9	172		172
5	UPN Yogja	4	52	2	0	54	4	58
6	LSPR	3	43	4	1	48	0	48
7	LKBN ANTARA	1	13	1	3	17		17
8	Dewan Pers	1	0	0	4	4		4
9	Kompas	1	15	0	0	15		15
	Grand Total	101	1531	143	78	1752	9	1761

PENYELENGGARAAN UKW UKW JANUARI TAHUN 2020

NO	NAMA LEMBAGA UKW	JUMLAH PENYELENGGARA UKW	MUDA	MADYA	UTAMA	TOTAL PESERTA KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	TOTAL SELURUH PENDAFTAR
1	PWI	23	410	71	18	499		499
2	AJI	4	65	9	23	97		97
3	IJTI	5	82	1	0	83	1	84
4	LPDS	1	10	0	0	10		10
5	UPN Yogja	2	21	0	0	21	9	30
6	LSPR	1	5	0	0	5		5
7	LKBN ANTARA	1	18	6	6	30		30
8	Tempo	1	0	5	10	15		15
9	Univ. Moestopo	1	12	0	1	13		13
	Grand Total	39	623	92	58	773	10	783



FOTO: BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

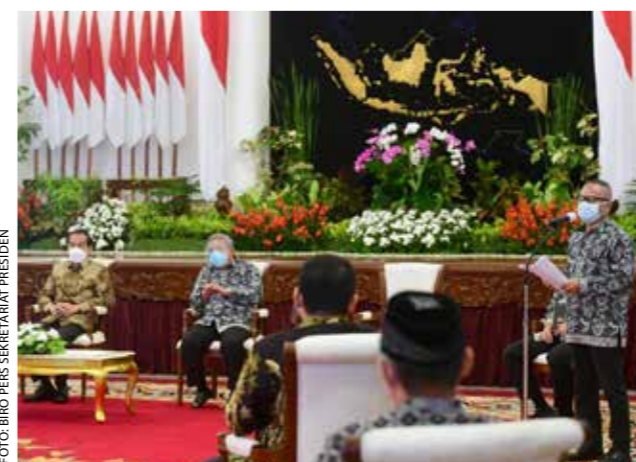


FOTO: BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

PRESIDEN Joko Widodo memperingati Hari Pers Nasional bersama jajaran pers dan perwakilan lembaga negara di Istana Negara 9 Februari 2021. Hadir di Istana Negara antara lain Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S. Depari, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate. Sedangkan di Candi Bentar Ancol hadir anggota Dewan Pers, Wakil Gubernur DKI Jakarta, peraih penghargaan HPN 2021, jajaran insan pers serta secara virtual dari berbagai provinsi. •



FOTO: DEWAN PERS PADLI



DALAM Konvensi Nasional Media Massa hari Senin (8/2) di Jakarta tampil antara lain Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly dan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas tantangan media di era Pandemi Covid-19. Ikut berbagi pengalaman Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, wartawan senior Ninuk Mardiana Pambudi dan Kemal Gani serta wakil dari Kementerian Keuangan. ● FOTO-FOTO: DEWAN PERS FADLI



FOTO: SCEENSHOT DARI ZOOM



FOTO: SCEENSHOT DARI ZOOM

KETUA Dewan Pers, Mohammad NUH memberikan kata sambutan dalam webinar bertema "Jurnalisme Berkualitas : Menkuatkan keberlangsungan profesi wartawan dan penerbitan pers guna menyehatkan demokrasi di tengah gempuran disrupsi digital" hari Minggu (7/2). Webinar dengan moderator Uni Lubis ini juga menghadirkan antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Moeldoko, CEO CT Corp Chaerul Tanjung dan di kantor PWI Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Atal S Depari. ●



FOTO: SCEENSHOT DARI ZOOM



FOTO: SCEENSHOT DARI ZOOM

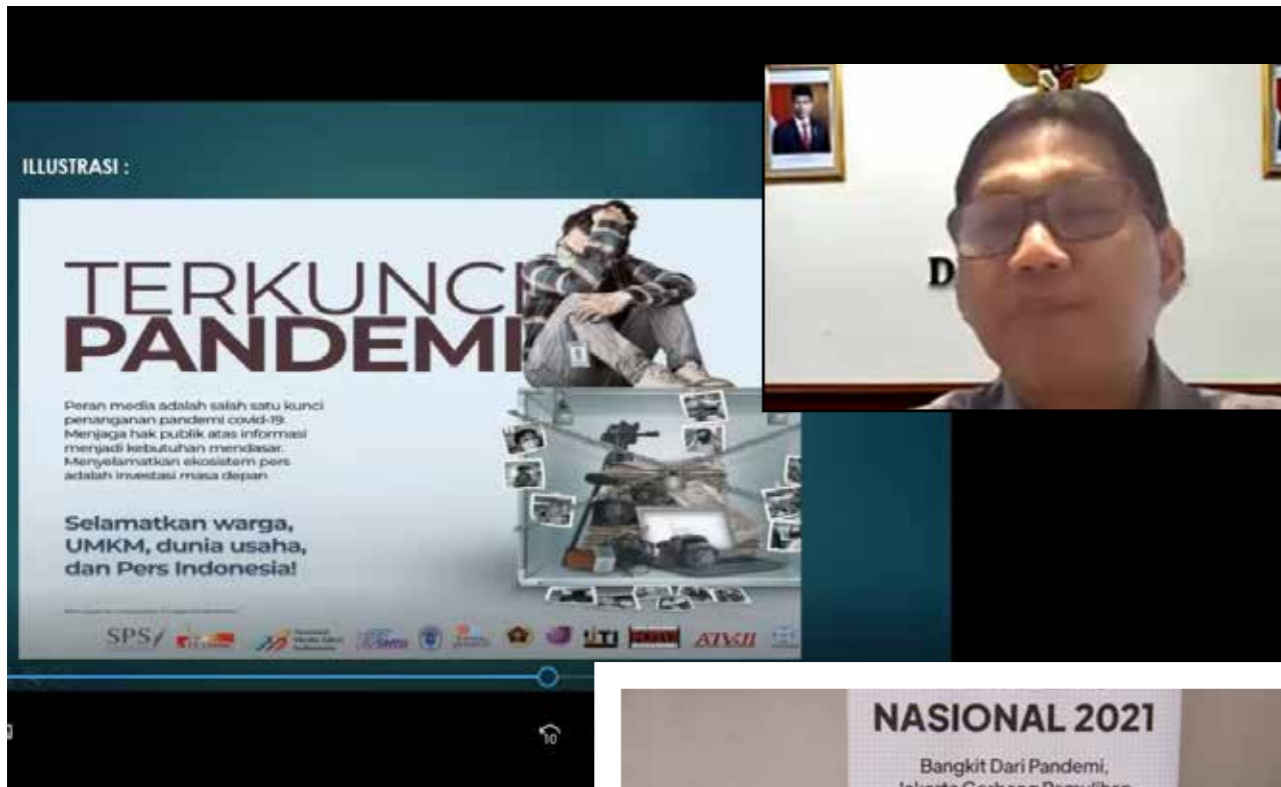


FOTO: SCEENSHOT DARI ZOOM



FOTO: DEWAN PERS FADLI

GALERI DEWAN PERS



ANGGOTA Dewan Pers, Jamalul Insan menjadi salah satu panelis dalam serangkaian webinar Hari pers Nasional (HPN) 2021, pada Minggu, (7/2). Dalam webinar tersebut, Jamalul Insan memaparkan materi dengan judul "Pers Nasional : Daya hidup dan pemulihan ekonomi sosial".



FOTO: SCENESHOT DARI ZOOM

FOTO: DEWAN PERS PADLI

FOTO: DEWAN PERS PADLI

GALERI DEWAN PERS



FOTO: BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

KETUA Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo dalam diskusi publik mengatakan Dewan Pers memastikan bahwa wartawan, khususnya yang bertugas melakukan peliputan di lapangan, akan segera mendapat suntikan dosis vaksin tahap pertama di gelombang kedua program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Diskusi Publik daring Dewan Pers dan BBC Media Action berjudul "Membangun Perilaku Masyarakat yang Kondusif Untuk Program Vaksinasi COVID-19: Setelah Nakes, Siapakah Prioritas Penerima Vaksinasi COVID-19 Selanjutnya?" berlangsung Kamis, 18 Februari 2021.

FOTO: FOTO: SCENESHOT DARI ZOOM



Florence Armein



Tikki Pang



Kadis Kesehatan NTT - dr. MESSERASI B. V. ...



GALERI DEWAN PERS



UKW di Serang, Banten (18/2)



KEGIATAN Uji Kompetensi Wartawan yang di selenggarakan Dewan Pers selama bulan Februari dan telah dilaksanakan antara lain di Provinsi Banten (18/2), Nusa Tenggara Barat (20/2), Sumatera Utara (24/2), Jambi (25/2), dan Kalimantan (27/2). ● FOTO-FOTO: DOK. SEKRETARIAT DEWAN PERS



UKW di Mataram, Nusa Tenggara Barat (20/2)



Swab sebelum UKW.



UKW di Medan, Sumatera Utara (24/2)

GALERI DEWAN PERS



KETUA Dewan Pers Mohammad NUH dan Ketua Komisi Polisi Nasional Moh. Mahfud M.D menandatangani Nota Kesepahaman kedua lembaga pada hari Rabu (3/2) di Jakarta. Nota Kesepahaman ini mengatur kerjasama dalam rangka pemberdayaan dan optimalisasi Kopolnas dengan Dewan Pers yang mencakup antara lain pertukaran data dan atau informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH dan Ketua Komisi Polisi Nasional Moh. Mahfud M.D menandatangani Nota Kesepahaman kedua lembaga pada hari Rabu (3/2) di Jakarta. Nota Kesepahaman ini mengatur kerjasama dalam rangka pemberdayaan dan optimalisasi Kopolnas dengan Dewan Pers yang mencakup antara lain pertukaran data dan atau informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencegahan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap pers sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pers yang dimaksud disini mencakup Perusahaan pers dan individu wartawan.

Selain dengan Dewan Pers, Kopolnas juga melaksanakan MOU dengan Ombudsman RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Komisi Kejaksaan RI. ● FOTO-FOTO: DOK. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)





KETUA Dewan Pers Mohammad Nuh membuka Pelatihan Pewawancara 34 Provinsi untuk Survei Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2021, di Jakarta, Kamis 18 Februari. Hadir memberikan materi pembekalan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun serta peserta pelatihan dari 34 provinsi yang akan melakukan wawancara untuk survei IKP. ● FOTO-FOTO: DOK. SUCOFINDO

